

BAB III

KONDISI BANTEN PADA MASA ORDE BARU

TAHUN 1966-1998 M

A. Kondisi Politik Banten Pada Masa Orde Baru

Politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan.¹ Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem dan melaksanakannya. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.²

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan rakyat Indonesia. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik adalah organisasi yang baru

¹ Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://pusatbahasa.diknas.go.id>, 2010. *Offline*.

² Muthiatul Hasanah, Peranan Kh. Muhammad Idris Ibrahim dalam bidang sosial-politik pada masa orde baru di menes tahun 1977-1997, (Skripsi, Program SI, IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten", Serang, 2016) P. 19.

dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan organisasi negara, dan partai politik baru ada di negara modern.³

Pada masa Orde Baru perbedaan nuansa politik di tanah air dimana kekuatan militer baik secara politis maupun sosiologis mendominasi, kontribusi kelompok militer sangat dipandang berjasa sejak melawan penjajah hingga menumpas gerakan pemberontak komunis. Sedangkan kekuatan politik pemerintah, yang dalam hal ini Golkar juga mendominasi karena disebabkan dipandang berjasa dalam menyingkirkan pemberontakan komunis dan bahkan anti komunis.⁴

Pada awal pemerintahannya, Orde Baru mampu menata tatanan politik pemerintahan secara baik, Presiden Soeharto mengubah sistem kebijakan dalam dan luar negeri secara dramatis meskipun dalam perkembangan berikutnya banyak terjadi penyimpangan. Pemerintahan pada masa itu sangat erat dengan kekerasan dan pemaksaan dimana sanksi kriminal diberikan pada pemberontak atau lawan politik, tetapi di sisi lain kemakmuran rakyat terjamin, barang-barang pemenuhan hidup dapat diakses dengan mudah akibat dari pinjaman-pinjaman besar ke luar negeri untuk mensejahterakan ekonomi rakyat.

Pada pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia dapat menjadi negara yang terpandang di dunia baik dari politik pemerintahan hingga budayanya. Hal tersebut salah satu hasil dari adanya Orde Baru. Kesuksesan lain adalah ketika kebijakan-kebijakan dapat terealisasikan. Pemerintah Orde Baru sangat ketat dalam urusan keamanan dan tidak transparan dalam penggunaan dana. Apabila ada pihak yang ikut campur

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Pt. Ikrar Mandiri abadi, 2010), cet.4, p. 397

⁴ Mansur Muhyidin, *Banten Menuju Masa Depan*, (Cilegon : CV. Semoga Jaya, 1999), p.379

dalam urusan pemerintahan maka bisa dipastikan pihak tersebut merupakan pahlawan politik dan akan dijatuhi hukuman.

Kondisi sosial serta politik pada masa Orde Baru terasa mencekam mengingat otoritas pemerintah yang tidak bisa diganggu gugat serta aturan-aturan yang tentunya bersanksi berat jika dilanggar. Ancaman yang berkelanjutan membuat banyak pihak mencoba berontak secara sembunyi-sembunyi. Anggota pemerintahan sendiri juga takut dengan para pemimpin pusat, Namun berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno atau Orde Lama. Pada pemerintahan Soeharto, Indonesia menjalin hubungan baik dengan luar negeri serta tidak lagi dibenci oleh negara-negara lain. Sebutan Macan Asia juga didapatkan Indonesia pada pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang banyak dipilih negara-negara lain sebagai bahasa yang diajarkan di tempat pembelajaran.

Munculnya Golkar sebagai kekuatan politik baru sering dianggap sebagai kekuatan politik utama Orde Baru karena dalam kaitan ini, Golkar didukung oleh tiga kekuatan dominan Orde Baru, yaitu:⁵

1. ABRI sebagai kekuatan kunci untuk melakukan “tekanan” atas kekuatan sipil yang mengganggu kekuatan Golkar;
2. Birokrasi, sebagai cikal bakal munculnya “monoloyalitas” Pegawai Negeri Sipil kepada Golkar dan akhirnya dikukuhkan melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri); dan
3. Golkar dijadikan alat Orde Baru untuk melanggengkan kekuasannya melalui formulasi yang dianggap demokratis

⁵ “Sitem Pemerintahan Orde Baru” Jakarta, 30 September 2005. <http://www.orangindonesia.com>. (diakses pada 10 februari 2010).

dengan tata cara dan prosedur pemilihan umum, Sidang Umum MPR, dan dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Semua unsur itu penting bagi Orde Baru, apalagi pada masa-masa awal, untuk mendapatkan kepercayaan dari dalam atau luar negeri.

Bidang politik dan pemerintahan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sela pada masa pemerintahan Orde Baru sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Stabilitas politik dijadikan prasyarat dalam melaksanakan pembangunan. Karena itu secara nasional pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang relatif seragam di setiap daerah, meskipun terdapat daerah-daerah tertentu yang diperlakukan khusus.

Secara geografis wilayah Banten sangat jauh dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia-Jakarta, kurang lebih 300 km dari pusat keresidenan Banten, Kabupaten Serang. Jika dilihat dari homogenitas daerah wilayah Banten dapat ditarik dari Tangerang sampai Merak⁶

Wilayah Banten yang dikenal dengan para Jawaranya dan tokoh-tokoh agama, serta etnis Baduy, berdekatan dengan Ibukota Jakarta, sehingga secara politis cukup strategis bagi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, wilayah Banten dijadikan prioritas untuk “distabilkan” mengingat peran ulama dan jawara sangat kuat dan dapat mengganggu kebijaksanaan politik pemerintah pusat Republik Indonesia.

Keberadaan kantor sosial politik di setiap daerah merupakan salah satu kebijakan yang sangat efektif dalam membantu setiap

⁶ Mansur Muhyidin, *Banten Menuju Masa Depan*, p.369

gerakan sekecil apapun yang dinilai dapat membahayakan negara Pemerintah Republik Indonesia. Lembaga tersebut mirip organisasi di negara-negara totaliter⁷, melakukan pengendalian (control) untuk mencegah terjadinya berbagai aspirasi yang bertentangan dengan kebijaksanaan/politik pemerintah.

Langkah tersebut sangat berhasil menjinakan Banten yang ditunjukkan dengan dukungan yang semakin besar bagi kemenangan Golkar (Golongan Karya) dalam setiap Pemilihan Umum selama Orde Baru, terutama sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1997. Dalam masa tersebut suara Golkar terus meningkat, sedangkan PPP dan PDI mengalami fluktuasi dengan perolehan jauh dibawah Golkar. ⁸

Banten terletak di Ujung Barat Pulau Jawa. Kondisi Banten dalam perpolitikan mengalami banyak perubahan, wilayah Banten awalnya sebuah pusat ibukota kerajaan⁹. Pada masa kolonial Belanda ketika daerah Banten dikuasai oleh Belanda Banten berstatus Afdeling, kemudian sejak tahun 1938 berubah nama menjadi Residentie. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang wilayah Banten bernama Shu.¹⁰ Di era Pemerintahan Republik Indonesia, wilayah Banten menjadi Karesidenan, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat.¹¹

⁷ Totalitér adalah bersangkutan dengan pemerintahan yg menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia *Offline*.

⁸ Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*, (Bandung: Provinsi Jawa Barat),p.62

⁹ Baik sebagai ibukota kerajaan Salakanagara, pusat Kerajaan Sunda “Banten Girang” maupun sebagai pusat kerajaan/Kesultanan Surosowan Banten.

¹⁰ Dadan Sujana, *Bank Banten* (Serang : Dinas Pendidikan Prov. Banten, 2011),...p.1-2

¹¹ Dadan Sujana, *Bank Banten*,...p.5

Dalam bidang pemerintahan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan di wilayah Banten tidak berbeda dengan wilayah lain, kecuali etnik Baduy yang diberi kebebasan sesuai adat istiadat. Kedua undang-undang tersebut bersifat sentralistik dan mengabaikan inisiatif dari bawah, jadi dampak sentralistik secara nasional dirasakan sama antar wilayah.¹²

Namun pada tahun 2000, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten, wilayah Banten berubah menjadi provinsi.¹³

Pemerintah Orde Baru mampu membaca kondisi di Banten, Presiden Soeharto sangat memahami betul potensi jawara sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh signifikan bagi masyarakat selain ulama. Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru berusaha merangkul kelompok jawara dan ulama ke dalam politik Golkar, Hal itu diwujudkan melalui prinsip kekaryaan. Prinsip kekaryaan yang dimaksudkan adalah mewadahi potensi jawara dalam sebuah organisasi bernama Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI). Selain itu, Pemerintah Orde Baru juga

¹² Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*, p. 63

¹³ Salah satu alasan pembentukan provinsi Banten adalah faktor sejarah. Setelah pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999, tentang otonomi daerah, status Banten sebagai nama dari suatu Karesidenan/wilayah I lambat laun akan hilang dari peta politik Indonesia. Oleh karena itu tokoh banten dan masyarakat menginginkan Banten menjadi provinsi, usulan pembentukan provinsi banten di setujui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya keputusan RUU No. 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten sebagai “Kelahiran Provinsi Banten” pada tanggal 4 Oktober di Senayan, Jakarta.

merangkul organisasi TTKKDH yang memiliki cabang-cabang perguruan di seluruh wilayah Banten.¹⁴

Dengan berhasil dikaryakannya potensi adat Banten, maka terjadi hubungan simbiosis antara pemerintah Orde Baru dengan jawara Banten. Hubungan simbiosis itu terlihat dengan adanya dukungan seluruh jawara terhadap politik Golkar yang direalisasikan dalam upaya memenangkan Golkar dalam setiap pemilu. Sementara pemerintah Orde Baru memberikan ruang yang cukup leluasa bagi para jawara untuk mengembangkan ekonomi, bisnis dan politik di Banten sehingga para jawara mampu untuk menjadi penguasa Banten.¹⁵

Bagi pemerintah Orde Baru, keterlibatan jawara dalam politik Golkar merupakan jaminan bagi tercapainya cita-cita untuk menguasai perpolitikan di wilayah Banten yang masih didominasi partai-partai Islam pada pemilu tahun 1955. Hal itu tentu saja sangat wajar mengingat di wilayah Banten, selain jawara, kiyai juga merupakan golongan elit yang memiliki pengaruh sangat signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga perkataan dan perbuatannya selalu diikuti oleh masyarakat dengan penuh rasa segan dan hormat. Selain itu, kiyai juga memiliki jaringan yang tersebar luas, melalui pesantren, murid-murid maupun masyarakat di sekitarnya, sehingga para kiyai Banten pada umumnya lebih memilih partai Islam sebagai pandangan politiknya.¹⁶

¹⁴ Skripsi Universitas Indonesia, *Seragam Hitam Dan Beringin : Keterlibatan Jawara Dalam Politik Golkar Di Banten 1971-1997*, Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2011, 14:39. P. 152

¹⁵ Skripsi Universitas Indonesia, *Seragam Hitam Dan Beringin : Keterlibatan Jawara Dalam Politik Golkar Di Banten 1971-1997*,...P.153

¹⁶ Skripsi Universitas Indonesia, *Seragam Hitam Dan Beringin : Keterlibatan Jawara Dalam Politik Golkar Di Banten 1971-1997*,...P.155

Dengan memanfaatkan pola hubungan partu-klien antara tokoh jawara dengan anak buanya, juga dengan kepemilikan sumber kekuasaan berupa kedudukan, kekuasaan fisik dan ekonomi, para jawara menggalang dukungan bagi Golkar yang terentang sampai masyarakat kelas bawah. Wujud dari dukungan itu , dapat dilihat dari hasil penghitungan suara dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1987, 1992 dan 1997. Pada masa pemilu tersebut, secara umum menunjukkan bahwa Golkar senantiasa dapat mendominasi hasil perolehan suara di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, meskipun hasil perolehan Golkar selalu mengalami jumlah yang fluktuatif dari waktu ke waktu pemilu.

Kondisi demikian diatas tentunya sangat wajar, karena tidak setiap kali perkataan dan perintah jawara didengar oleh masyarakatnya. Selain itu masyarakat Banten yang terkenal dengan kereligiusannya pada masa Orde Baru, mau tidak mau menjadikan partai Islam sebagai tantangan serius bagi partai Golkar. Namun, tantangan itu kemudian berhasil diminimalisir antara lain dengan mengeluarkan kebijakan asas tunggal dan penghapusan lambang-lambang keagamaan. Akan tetapi dari semua kebijakan itu, yang lebih penting kontribusinya, yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dan kelompok elit lokal Banten yaitu jawara (Jawara dan Kiyai) sehingga Golkar bisa menguasai dan memonopoli perolehan suara pada pemilu 1997, dengan perolehan suara 80% di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Jawara merupakan entitas khas masyarakat Banten. Istilah jawara, meskipun sangat problematis, tapi pada umumnya merujuk pada sebutan bagi seseorang atau kelompok orang yang dipercaya memiliki keunggulan fisik, berilmu magis, dan memiliki keberanian.

Keberanian dan keunggulan fisik inilah yang menjadi ciri khas dari karakter jawara.

Secara historis, keberadaan jawara dalam struktur masyarakat Banten sudah ada semenjak pendirian Kesultanan Banten dan semakin signifikan kedudukan dan peranannya semenjak kesultanan Banten dianeksasi oleh kolonial Belanda, bersama dengan peran kiyai. Jawara kemudian menjadi elit revolusi yang mampu untuk menggerakkan masa menentang penjajahan kolonial Belanda. Kegigihan elit kedua masyarakat ini, menimbulkan kesan positif dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap jawara sebagai pahlawan.¹⁷

Mulai tahun 1997 setelah kondisi politik-sosial-ekonomi mulai tidak stabil, maka terjadilah penindasan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini merupakan pengrusakan aspek sosial di masyarakat. Pemaksaan institusi untuk kepentingan politik dilakukan karena tuntutan akan kestabilan di pemerintahan Orde Baru. Kesenjangan sosial semakin meningkat akibat kebijakan yang berorientasi pertumbuhan dan melupakan pemerataan serta distribusi yang adil. Beratnya hukuman yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang sekiranya dapat menjadikan ancaman bagi pemerintah membuat masyarakat umum memilih diam. Pemikiran-pemikiran yang terpendam membuat konflik tersendiri di beberapa kalangan, baik perseorangan maupun golongan.¹⁸

Kondisi politik Banten masa Orde Baru tidak terlepas dari keinginan masyarakat Banten untuk menjadi sebuah Provinsi, lepas dari

¹⁷ Skripsi Universitas Indonesia, *Seragam Hitam Dan Beringin : Keterlibatan Jawara Dalam Politik Golkar Di Banten 1971-1997*,...P.154

¹⁸ . Ikrar Nusa Bakti, *Tentara Mendamba Mitra, Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan Militer dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999),p. 110

Jawa Barat. Pada tahun 1963, beberapa tokoh Banten yang terdiri atas para eksekutif, legislatif, dan kalangan partai politik berkumpul di pendopo Kabupaten Serang, yang kemudian terbentuklah Panitia Persiapan Provinsi Banten.

Namun gerakan pembentukan provinsi Banten tidak terlepas dari unsur PKI karena sistem politik tahun 1963 mengacu pada Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), kemudian PKI memberontak sehingga pemerintah melenyapkan PKI dari perpolitikan. Termasuk dalam kepanitiaan Pembentukan Provinsi Banten unsur PKI dikeluarkan.¹⁹

Pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1967-1970 gerakan tuntutan provinsi Banten gencar kembali, DPRD-GR tingkat satu pimpinan Kastura mengadakan dengar pendapat dengan tokoh politik dan organisasi masyarakat di Serang tentang provinsi Banten.²⁰

Selama kekuasaan Orde Baru berlangsung, isu pembentukan Provinsi Banten meredup karena dianggap membangkang terhadap pemerintah pusat, para tokoh Banten yang ikut serta dalam kepanitiaan dijaga ketat oleh para militan Orde Baru sehingga para tokoh Banten menemui kesulitan dalam membangun kembali keinginan membentuk Provinsi Banten.

Pada awal gerakan reformasi, masyarakat Banten menjadi sangat mudah di mobilisasi untuk menentang kelompok lain yang dianggap non-Islam dan menentang pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan Pasukan Pam Swakarsa dari wilayah

¹⁹ Khatib mansur, *Perjuangan Rakyat Banten menuju Provinsi Banten*,.p.90

²⁰ Khatib mansur, *Perjuangan Rakyat Banten menuju Provinsi Banten*,.P.93-

Banten yang memenuhi Jakarta pada saat Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pasukan tersebut sebagian besar dari pesantren atau kelompok masyarakat yang masih menghormati kepemimpinan ulama.²¹

B. Kondisi Sosial Banten Pada Masa Orde Baru

Masalah sosial bangsa Indonesia pada masa Orde Baru semakin rumit dengan berlanjutnya urbanisasi. Pada tahun 1971, sebanyak 17,3% dari penduduk Indonesia tinggal di kota jika dibandingkan dengan 14,8% pada tahun 1962 dan 3% pada tahun 1930. Pada tahun 1971 penduduk Jakarta sudah melampaui 4,5 juta jiwa. Pulau Jawa tercatat sebagai pulau dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia yaitu sekitar 60,4% pada tahun 1971. Pemerintah Orde Baru gagal memindahkan penduduk di Pulau Jawa ke luar pulau dalam proporsi yang signifikan. Kebijakan memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang ini disebut Transmigrasi.²²

Masa Orde Baru, wilayah Banten yang meliputi empat Kabupaten yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang dan dua Kotamadya : Kotamadya Cilegon dan Kotamadya Tangerang. Secara keseluruhan wilayah Banten dihuni oleh 7,6 juta Jiwa. Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industrilisasi dimasa depan,

²¹ Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*,.p.63

²² M.C. Rickhiefs, *Sejarah indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi, 2008),...p.591-592

karena implikasi dari kebijakan terhadap migrasi dan urbanisasi dari daerah di luar Banten.²³

Secara nasional pertumbuhan penduduk rata-rata adalah 1,6% pertahun. Dan pertumbuhan penduduk wilayah Banten 1,54% , meskipun laju pertumbuhan penduduk wilayah Banten terhitung kecil, tetapi apabila tidak dikendalikan secara lebih baik, maka akan terjadi ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung wilayah. Penduduk wilayah Banten mayoritas 70% tinggal di pedesaan dan hanya 30% yang mampu tinggal di perkotaan.²⁴

Secara geografis, Banten memiliki luas 8.800,83 KM² dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Bagian selatan merupakan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 400 meter diatas permukaan laut, sedangkan di bagian utara merupakan daratan rendah dan difungsikan sebagai lahan persawahan. Perbedaan karakter tanah (Geografis) membuat kondisi sosialnya juga berbeda.

Stratifikasi sosial di Banten, pada awal di zaman Kesultanan, lapisan atas dalam stratifikasi sosial adalah para sultan dan keluarga/keturunan sebagai lapisan bangsawan. Kemudian para pejabat kesultanan dan akhirnya rakyat biasa. Pada perkembangan selanjutnya, hilangnya Kesultanan Banten yang sebagian perannya beralih pada kiyai (Kaum spritual) dalam stratifikasi sosial merekalah yang ada pada lapisan atas.²⁵

²³ Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*,.p.65

²⁴ Herman Fauzi, *Banten Dalam Peralihan*, (Tangerang : YASFI, 2000),.p. 233

²⁵ "Potret Budaya Banten Dulu, Kini dan Nanti", Serang, 10 No., 2001. [http://www. Bantenologi.org](http://www.Bantenologi.org). (Diakses pada 9 juli 2010)

Namun perkembangan selanjutnya peran kiyai/ulama dapat tertandingi oleh kehadiran Jawara, dimana Jawara mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Banten. Kata kiyai sendiri dalam bahasa Jawa memiliki arti manusia yang dianggap atau dipandang memiliki sifat-sifat yang istimewa, karena itu sangat dihormati dan dikagumi. Sedangkan Jawara menurut M.A Tihami adalah murid Kiyai²⁶ dimana mereka lebih condong ke arah fisik dan ilmu persilatan sehingga kemampuannya setelah keluar dari pesantren adalah mampu membela diri.²⁷

Keberadaan jawara pada saat itu mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, kemudian dijadikan sebagai pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal. Oleh sebab itu, secara bertahap para jawara mengalami mobilitas dalam sistem hierarki sosial. Para jawara tidak lagi menjadi kelas bawah dalam sistem stratifikasi masyarakat pribumi, melainkan sudah menjadi kelompok elit yang memiliki kekuasaan, berpengaruh dan turut menentukan kebijakan. Pengaruh tersebut semakin besar setelah para jawa terlibat di dalam partai Golkar pada Masa Orde baru.

Perubahan sosial yang cukup besar yang terjadi pada rakyat Banten telah merubah persepsi masyarakat tentang peran-peran jawara. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang menginginkan istilah jawara dihilangkan, sehingga citra budaya “kekerasan” yang selama ini

²⁶ Menurut M.A. Tihami Kiyai di Banten Tempo dulu tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama islam saja tetapi mengajarkan juga ilmu persilatan atau *kanuragan* dalam perkembangannya murid kiyai yang lebih mendalami di bidang intelektualnya di sebut Santri, sedangkan murid Kiyai yang mendalami di bidang fisik dan condong kepada persilatan atau ilmu-ilmu *Kanuragan* kemudian di sebut Jawara.

²⁷ M.A. Tihami, *Tasbih dan Golok (Kedudukan, Peran, dan Jaringan Kiyai dan Jawara di Banten)*, (Cilegon : CV.Larayba, 2005),p. 58-62

melekat pada “orang luar” terhadap masyarakat Banten bisa dihilangkan.

Meskipun demikian, peran-peran sosial dan politik yang dimainkan oleh orang-orang yang selama ini dikenal “jawara” saat ini sangat besar di wilayah Banten. Para tokoh jawara, yang kini menamakan dirinya pendekar, menduduki sektor-sektor penting dalam bidang ekonomi, sosial dan politik di Banten.²⁸

Peran-peran tradisional sosial jawara dalam masyarakat Banten berlangsung turun naik. Hal ini pula yang merubah persepsi masyarakat terhadap jawara. Pada waktu situasi sosial yang kurang stabil, peran jawara biasanya sangat penting, tetapi ketika masyarakat dalam keadaan damai peran jawara kurang diperlukan. Bahkan sering dipandang negatif karena perilakunya yang sering melakukan kekacauan dan kekerasan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kriminal. Namun demikian peran-peran sosial yang sering dimainkan oleh para jawara adalah di seputar kepemimpinan seperti menjadi *jaro* (lurah), penjaga keamanan desa (*jagakersa*) dan guru silat dan guru ilmu *magis*.²⁹

Hubungan sosial kota-desa di wilayah Banten masa Orde Baru masih mencerminkan pola hubungan paternalistik. Pola hubungan ini tidak jarang mengakibatkan lahirnya praktek eksploitasi yang lebih menguntungkan pihak kota.

²⁸ M.A. Tihami, *Tasbih dan Golok (Kedudukan, Peran, dan Jaringan Kiyai dan Jawara di Banten)*,....p.63

²⁹ M.A. Tihami, *Tasbih dan Golok (Kedudukan, Peran, dan Jaringan Kiyai dan Jawara di Banten)*,....p.65

C. Kondisi Pendidikan Banten Masa Orde Baru

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.³⁰ Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan dan memiliki jangkauan waktu yang sangat panjang.

Pendidikan memiliki peran sebagai sebuah gerakan penyadaran masyarakat. Penyadaran yang dimaksud disini adalah bagaimana melalui pendidikan tertanam cita-cita dalam diri masyarakat tentang perlunya mengubah diri dalam rangka pencapaian cita-cita dalam diri masyarakat tentang perlunya mengubah diri dalam rangka pencapaian cita-cita di masa yang akan datang.³¹

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa

³⁰ Ehta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://pusatbahasa.diknas.go.id>, 2010. *Offline*

³¹ Agus Mulyana, "Pendidikan Nasional dan Perubahan Budaya Sebuah Renungan Historis", *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 1, No. 1 (Juli-Desember 2002),p.87.

ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan³² kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik.

Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan yaitu bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1973-1978 dan 1983 dalam sidang MPR tersusun GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Apabila ditinjau dari falsafah Negara Pancasila, dari konstitusi UUD 1945, dan keputusan MPR tentang GBHN maka kehidupan beragama dan pendidikan agama Islam di Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai pelita VI tahun 1983 semakin membaik.³³

Standar pendidikan masa Orde Baru masih rendah tetap jauh lebih baik dari pada zaman Belanda. Sensus pada tahun 1971 menunjukkan bahwa tingkat “melek” huruf bagi anak yang berusia 10 tahun adalah 72 % dikalangan laki-laki dan 50,3% pada perempuan. Tetapi secara umum kualitas sekolah menurun sejak tahun 1950an,

³² Memampatkan adalah menjejat (menekan, memadatkan). Lihat KBBI *Offline*

³³ A. Zakki Fuad, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), p. 154.

sehingga angka melek huruf ini tidak bisa dianggap sebagai bukti bahwa pendidikan formal sudah cukup tersedia.³⁴

Pada tahun 1973, 57% (11,8 juta) dari penduduk yang berusia 7-12 tahun duduk di Sekolah Dasar. Untuk Perguruan Tinggi, pemerintah Masa Orde Baru hanya seprempat dari 1% (329.300) yang terdaftar di Perguruan Tinggi Negeri. Kualitas pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi juga menuai kritik. Pemerintah mampu membuat kemajuan besar di bidang pendidikan dan kesehatan di pertengahan tahun 1970.³⁵

Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, Indonesia banyak mengirim tenaga-tenaga profesional terutama guru-guru ke Malaysia, sedangkan sekarang pemerintah Indonesia sekarang lebih banyak mengirim pekerja kasar yang tidak profesional.³⁶

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak masa Orde Baru, antara lain digariskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani agar menjadi manusia-manusia pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat nasional adalah sebagai berikut :³⁷

³⁴ M.c. Rickhlef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, p.595

³⁵ M.c. Rickhlef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, p.590-591

³⁶ Agus Mulyana, "Pendidikan Nasional dan Perubahan Budaya Sebuah Renungan Historis", *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 1, No. 1 (Juli-Desember 2002), p.87.

³⁷ Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*, p.67

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi.
2. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah
3. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan
4. Rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah (Inpres)

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program/proyek yang didanai dari sumber dana APBN dan dilakukan hampir setiap tahun diseluruh Kabupaten/Kota secara proporsional.

Program/proyek yang dilaksanakan dari sumber dana APBN dan dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota termasuk diwilayah Banten adalah :³⁸

1. Peningkatan pendidikan dasar.
2. Operasi dan perawatan fasilitas Dikdasmen.
3. Penataran guru
4. Pengadaan buku pelajaran pokok
5. Proyek sekolah lanjutan tingkat pertama
6. Proyek sekolah menengah umum
7. Pendidikan luar sekolah

Tujuan pembangunan pendidikan adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, dengan arah kebijaksanaan sebagai berikut :³⁹

³⁸ Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*, p.65

³⁹ Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*, p.68

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya SD/MI, sekolah lanjutan dan perguruan tinggi.
2. Meningkatkan kinerja guru disertai persebaran guru yang merata disemua daerah
3. Meningkatkan bantuan fasilitas khususnya dan kemudahan kepada siswa-siswi yang tidak mampu serta kepada siswa berprestasi.

Implementasi dari kebijakan dalam pembungan pendidikan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diseluruh daerah Kabupaten/Kota secara proporsional, sebagai berikut :⁴⁰

1. Pengadaan buku materi pelajaran SD
2. Pembinaan pembelajaran Wajar DIKDAS
3. Pengadaan perlengkapan kelas
4. Pembinaan dan pengembangan ekstrakurikuler dan Pendidikan Luar Sekolah

Pada masa Orde Baru pemerintah belum merata di Banten, dalam wawancara dengan penulis buku *Catatan Masalalu Banten*, Mudjahid Chudori mengatakan bahwa keadaan pendidikan di Banten masa Orde Baru belum merata sepenuhnya di daerah Banten tercatat dalam memori Mudjahid Chudori bahwa selama Orde Baru berlangsung, pendidikan di Banten yang mengalami kemajuan adalah daerah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.

⁴⁰ Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*,.p.69-70

Alasan Kabupaten Serang dan Tangerang maju dalam hal pendidikan karena karena bebrapa alasan diantaranya adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Kabupaten Serang merupakan ibukota Residen Banten.
2. Tangerang merupakan tetangga ibukota Republik Indonesia.
3. Anggaran terserap banyak di Kabupaten Serang sebagai ibukota Residen Banten

Sedangkan daerah yang tertinggal di daerah keresidenan Banten masa Orde Baru adalah Lebak, Pandeglang dan Cilegon

Tarap pengetahuan penduduk wilayah Banten dapat dikatakan relatif rendah. Indikator yang digunakan dalam memantau aspek pendidikan ini adalah rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk wilayah Banten, RLS penduduknya berkisar antara 5 tahun dan 6 tahun dengan demikian rata-rata tingkat pendidikan wilayah Banten adalah tidak tamat SD, Kecuali Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang dimana rata-rata penduduknya adalah tamatan SD (Sekolah Dasar). Tinggi rendahnya rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk, partisipasi sekolah, geografi, sarana dan prasarana pendidikan serta budaya dan perilaku masyarakatnya.⁴²

Di wilayah Banten pada umumnya angka partisipasi murni pada jenjang sekolah dasar (SD) sudah cukup tinggi walaupun masih berada di bawah Jawa Barat. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya

⁴¹ A.Mudjahid Chudori, “*Kondisi Politik, Sosial Dan Pendidikan Di Banten Masa Orde Baru*”, diwawancarai oleh Ahmad Kamaludin, di Kediaman Rumahnya, Penancangan, pada tanggal 21 Desember 2016, pukul 10.20 WIB.

⁴² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*,p.24-25

partisipasi penduduk pada jenjang yang lebih tinggi (Angka Partisipasi Murni SLTP dan SLTA), sangat jauh berada di bawah Jawa Barat.

Kondisi ini kemungkinan besar berkaitan dengan fenomena maupun kemungkinan faktor budaya lokal yang ada seperti banyak orang tua yang memperkerjakan anaknya setelah tamat pendidikan dasar bahkan sebelum tamat pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini karena untuk membantu ekonomi keluarganya, atau dinikahkan pada usia muda.⁴³

⁴³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, *Perkembangan Pembangunan dan Prospek Wilayah Banten*, p.27